



**PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
PANITIA SELEKSI PENGADAAN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA**

Jl. El Tari No. 2, Telp (0381) 21053

P E N G U M U M A N
NOMOR : BKPSDM.800/4373/PP/IX/2024

**TENTANG
SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
FORMASI TAHUN ANGGARAN 2024**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 329 Tahun 2024 tanggal 2 Agustus 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Ende Formasi Tahun 2024, maka Pemerintah Kabupaten Ende membuka kesempatan untuk mengikuti seleksi Pengadaan Pegawai pemerintah dengan Perjanjian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende dengan mekanisme dan ketentuan sebagai berikut:

A. LOWONGAN FORMASI

Jumlah Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende sebanyak 1.200 formasi dengan rincian sebagai berikut:

- 1). Jabatan Fungsional Guru sebanyak 300 formasi;
- 2). Jabatan Fungsional Kesehatan sebanyak 300 formasi;
- 3). Jabatan Fungsional Teknis sebanyak 600 formasi

B. DASAR

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 349 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan di Lingkungan Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 391 Tahun 2024 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi Sebagai Penambah Nilai SKT Pengadaan PPPK Untuk Jabatan Fungsional;
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024;

7. Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor:1311/B.B1/HK.04,01/2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024;
8. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor:6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 27 September 2024 hal Jadwal Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024.

C. KRITERIA PELAMAR PADA PENDAFTARAN FORMASI PPPK TAHUN 2024

1. Jabatan Fungsional Guru

Kriteria pelamar pada pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional (JF) Guru di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024 meliputi:

- a. Pelamar Prioritas
Peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada Seleksi Pengadaan PPPK JF guru di instansi daerah tahun 2021 dan belum pernah lulus pada Seleksi Pengadaan PPPK JF guru periode sebelumnya.
- b. Guru eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II)
Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan aktif mengajar di Instansi Pemerintah;
- c. Guru non Aparatur Sipil Negara (non-ASN) di Instansi Daerah yang terdiri atas pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) BKN yang aktif mengajar pada Instansi Pemerintah; atau guru Non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan aktif mengajar paling sedikit 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester secara terus-menerus di instansi tempat mengajar saat mendaftar.
- d. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- e. Pelamar sebagaimana dimaksud pada huruf 1a, 1b dan 1c hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat mengajar saat mendaftar;
- f. Dalam hal terdapat pelamar prioritas berasal dari luar instansi pemerintah atau dari sekolah swasta, disyaratkan memiliki surat izin untuk melamar pada seleksi PPPK JF guru di instansi daerah tahun anggaran 2024 dari kepala instansi/lembaga/yayasan;
- g. Pelamar pada seleksi PPPK JF Guru di instansi daerah tahun anggaran 2024 wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah Sarjana atau Diploma IV dan/atau sertifikat pendidik sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor:1311/B.B1/HK.04,01/2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024;
- h. Pelamar seleksi PPPK JF guru di instansi daerah tahun anggaran 2024 yang berstatus sebagai penyandang disabilitas, berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penyandang Disabilitas Rungtu tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF guru bahasa indonesia atau JF guru bahasa inggris;
 - b. Penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan; dan
 - c. Penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF guru seni budaya keterampilan.

2. Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis

- 1) Kriteria pelamar PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan dan Jabatan Fungsional Teknis meliputi:
 1. Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II);
 2. Tenaga Non ASN yang terdiri atas:
 - a. Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) Tenaga Non ASN pada BKN dan aktif bekerja pada Instansi Pemerintah;
 - b. Pegawai yang aktif bekerja pada Instansi Pemerintah paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus.
- 2) Pelamar sebagaimana dimaksud pada poin 1) hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar.
- 3) Dalam hal terdapat kebutuhan pada JF bidang kategori keahlian, kebutuhan jabatan tersebut dapat dilamar oleh pelamar D-IV Bidang Pendidik Tahun 2023.
- 4) Khusus untuk Pelamar Jabatan Fungsional Kesehatan pada Seleksi Pengadaan PPPK tahun anggaran 2024 wajib memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan dengan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024;
- 5) Persyaratan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024 Tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;
- 6) Sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga yang berwenang sebagai tambahan nilai yang diberikan sesuai dengan bobot persentase dari nilai paling tinggi Seleksi Kompetensi Teknis, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 391 Tahun 2024 Tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional.

D. PERSYARATAN

1. Pelamar merupakan Warga Negara Indonesia (WNI);
2. Usia pelamar :

Usia pelamar paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat melamar PPPK;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;

5. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
8. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
9. Setiap pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran paling singkat 2 (dua) tahun pada Jabatan Pelaksana, dibuktikan dengan surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja;
10. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;

E. DOKUMEN PERSYARATAN YANG DIUNGGAH

Setiap pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Guru, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2024 wajib melampirkan scan dokumen persyaratan dengan dokumen asli, terlihat dan terbaca dengan jelas sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran yang terdiri dari:

1. Pas foto terbaru menggunakan pakaian formal berlatar belakang berwarna merah;
2. surat lamaran Asli (diktik) dan sudah ditandatangani serta dibubuhi meterai Rp.10.000 ditujukan ke Bupati Ende (format terlampir);
3. Ijazah asli pendidikan yang dipersyaratkan pada jabatan yang dilamar;
4. Transkrip Nilai Asli pendidikan yang dipersyaratkan pada jabatan yang dilamar;
5. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang telah ditandatangani dan dibubuhi meterai Rp.10.000
6. Kartu Tanda Penduduk / Surat Keterangan / Bukti Identitas Kependudukan Lainnya dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang asli;
7. Surat Keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerjadengan pengalaman di bidang kerja paling singkat 2 (dua) s.d 8 (delapan) tahun sesuai dengan jenjang dan jabatan yang dilamar (format surat keterangan pengalaman kerja PPPK terlampir).
8. Surat Keterangan Aktif Bekerja pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar yang ditandatangani pimpinan unit kerja, bagi pelamar yang tidak terdaftar dalam database non-ASN BKN, masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus (Format Surat Keterangan Aktif Bekerja terlampir).
9. Surat Pengalaman Kerja dan Surat Keterangan Aktif Bekerja masing-masing jabatan yang akan dilamar sebagai berikut:
 - a. Khusus bagi pelamar tenaga guru, yang mengajar pada sekolah negeri, surat pengalaman kerja sesuai kompetensi tugas jabatan yang dilamar dan surat keterangan aktif bekerja terus-menerus ditandatangani oleh Kepala Sekolah. Sedangkan yang mengajar di sekolah swasta ditandatangani oleh ketua Yayasan.
 - b. Khusus bagi pelamar tenaga Kesehatan Surat Keterangan Pengalaman kerja dan Surat Keterangan Aktif Bekerja paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus ditandatangani oleh:
 1. Kepala Puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Puskesmas;
 2. Direktur Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Rumah Sakit;
 3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja eselon II.
 - c. Khusus bagi pelamar jabatan fungsional dan pelaksana, Surat Keterangan Pengalaman kerja dan Surat Keterangan Aktif Bekerja pada instansi pemerintah atau aktif bekerja

- pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus ditandatangani oleh pimpinan unit kerja (pimpinan perangkat daerah).
10. Setiap pelamar Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2024 wajib melampirkan Surat Tanda Registrasi (STR) Asli bagi Jabatan Fungsional yang mensyaratkan STR dan harus masih berlaku pada saat pelamaran yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis dalam STR.
 11. Khusus Penyandang Disabilitas yang melamar pada formasi PPPK wajib melampirkan:
 1. Asli Surat Keterangan Dokter yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasnya, dan dikemudian hari terbukti bahwa calon pelamar tersebut adalah benar sebagai Penyandang Disabilitas maka pelamar tersebut dapat digugurkan keikutsertaan/kelulusan yang bersangkutan;
 2. Membuat video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
 12. Khusus Penyandang Disabilitas yang melamar pada formasi PPPK wajib melampirkan:
 1. Asli Surat Keterangan Dokter yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasnya, dan dikemudian hari terbukti bahwa calon pelamar tersebut adalah benar sebagai Penyandang Disabilitas maka pelamar tersebut dapat digugurkan keikutsertaan/kelulusan yang bersangkutan;
 2. Membuat video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
 13. Berkaitan dengan penggunaan meterai pada dokumen yang akan diunggah, kepada para pelamar **diperkenankan untuk dapat memilih menggunakan meterai elektronik maupun meterai konvensional (tempel)** dengan catatan tidak menggunakan meterai yg sama pada setiap dokumen surat yang akan diunggah pada akun sscasn;

F. TATA CARA PENDAFTARAN

Pelamaran hanya dilakukan melalui laman sscasn.bkn.go.id dengan tata cara pelamaran sebagai berikut :

1. Pelamar membuat akun pada Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) melalui tautan <https://sscasn.bkn.go.id>, dengan memasukkan data diri dalam KTP berupa NIK, Nama, Tempat Tanggal Lahir dan Nomor Kartu Keluarga lalu mengikuti formulir petunjuk yang diberikan. Pelamar yang sudah memiliki akun pada SSCASN tahun anggaran sebelumnya tetap harus membuat akun pada SSCASN tahun anggaran 2024. Pelamar yang sebelumnya sudah memiliki akun SSCASN Tahun Anggaran 2024 dapat menggunakan akunnya kembali hanya jika belum melakukan pelamaran pada Seleksi CPNS Tahun 2024;
2. Setelah membuat akun, pelamar login menggunakan NIK dan Password yang sudah ditentukan;
3. Pelamar mengisi biodata terdiri dari data diri, nama dan tanggal lahir sesuai ijazah yang dimiliki, derajat disabilitas dan link video disabilitas (jika merupakan seorang disabilitas) serta data diri lainnya;
4. Pelamar memilih jenis pengadaan yang akan dilamar, apakah akan melamar PPPK JF Guru, PPPK JF Kesehatan dan PPPK Teknis (Fungsional dan Pelaksana);
5. Bagi pelamar kategori THK-II, wajib mencantumkan Nomor Peserta Ujian THK-II setelah memilih pengadaan. Bagi yang tidak memasukkan nomor Peserta THK-II tidak akan mendapatkan afirmasi/prioritas khusus dalam pengolahan hasil seleksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Pelamar memilih dan mengisi data terkait kualifikasi Pendidikan sesuai dengan persyaratan formasi jabatan yang dilamar;

7. Pelamar memilih Lokasi ujian;
8. Pelamar mengunggah dokumen sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - **Surat Pernyataan 5 Poin** yang sudah ditandatangani dan dibubuhi meterai.
 - **Surat Lamaran** yang ditujukan kepada Bupati Ende sesuai dengan persyaratan instansi, ditandatangani dan dibubuhi meterai.
 - **Kartu Tanda Penduduk**/Bukti Identitas Kependudukan Lainnya dari Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil;
 - **Ijazah** sesuai kualifikasi pendidikan dan formasi jabatan yang dilamar. Bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - **Transkrip Nilai** sesuai kualifikasi pendidikan dan formasi jabatan yang dilamar.
 - **Pas Foto** formal terbaru berlatar belakang warna merah;
 - **Surat Tanda Registrasi** yang **masih berlaku** bagi tenaga kesehatan tertentu;
 - Khusus Disabilitas Surat keterangan menyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh Dokter pada rumah sakit pemerintah / puskesmas;
 - Saat resume, pastikan kembali dokumen yang diunggah sudah sesuai dan benar agar menghindari terjadinya TMS saat verifikasi administrasi. Jika Sudah sesuai, pelamar dapat memilih pada “akhiri Pendaftaran”.

G. PELAKSANAAN SELEKSI

1. Seleksi pengadaan PPPK terdiri atas dua tahap yaitu Seleksi Administrasi dan Seleksi Kompetensi;
2. Pengumuman jadwal seleksi dan hasil seleksi dapat dilihat pada *website sscasn.bkn.go.id dan <https://www.endekab.go.id>*;
3. Pelamar yang keberatan dengan hasil seleksi dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi diumumkan;
4. Alasan sanggahan yang dimaksud pada angka 3 (tiga) hanya dapat dilakukan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
5. Pengumuman Pasca Masa Sanggah paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah;
6. Seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran;
7. Pelamar yang diumumkan lulus seleksi administrasi mengikuti seleksi kompetensi dengan menggunakan sistem *Computer Asissted Test (CAT)* BKN;
8. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi adalah pelamar yang berperingkat terbaik;

H. JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI

Jadwal seleksi pengadaan PPPK formasi Tahun 2024 antara lain:

1. Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK T.A. 2024 bagi Pelamar Prioritas (Pelamar Prioritas Guru dan D-IV Bidang Pendidik Tahun 2023), Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) dan Tenaga non ASN yang Terdata dalam Pangkalan Data (Database) BKN

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1	Pengumuman Seleksi	30 September s.d 19 Oktober 2024
2	Pendaftaran Seleksi	1 s.d 20 Oktober 2024
3	Seleksi Administrasi	1 s.d 29 Oktober 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	30 Okotber s.d 1 November 2024
5	Masa Sanggah	2 s.d 4 November 2024
6	Jawab Sanggah	2 s.d 6 November 2024

7	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	5 s.d 11 November 2024
8	Penarikan data final	12 s.d 14 November 2024
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	15 s.d 25 November 2024
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat Seleksi Kompetensi	26 November s.d 1 Desember 2024
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	2 s.d 19 Desember 2024
12	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	7 s.d 23 Desember 2024
13	Pengumuman Hasil Kelulusan	24 s.d 31 Desember 2024
14	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d 31 Januari 2025
15	Usul Penetapan NI PPPK	1 s.d 28 Februari 2025

2. **Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2024 bagi Pelamar Tenaga Non ASN yang Aktif Bekerja di Instansi Pemerintah (Termasuk Lulusan PPG Untuk Formasi Guru di Instansi Daerah)**

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1	Pengumuman Seleksi	1 s.d 30 November 2024
2	Pendaftaran Seleksi	17 November s.d 31 Desember 2024
3	Seleksi Administrasi	16 Desember 2024 s.d 3 Februari 2025
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	4 s.d 18 Februari 2025
5	Masa Sanggah (*)	19 s.d 21 Februari 2025
6	Jawab Sanggah	20 s.d 27 Febrauri 2025
7	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	22 s.d 28 Febrauri 2025
8	Penarikan data final	1 s.d 7 Maret 2025
9	Pemetaan titik lokasi seleksi kompetensi	8 s.d 23 Maret 2025
10	Penjadwalan seleksi kompetensi	2 Maret s.d 8 April 2025
11	Pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi kompetensi	9 s.d 16 April 2025
12	Pelaksanaan seleksi kompetensi	17 April s.d 21 Mei 2025
13	Pengolahan nilai seleksi kompetensi	22 April s.d 21 Mei 2025
14	Pengumuman hasil kelulusan(**)	22 s.d 31 Mei 2025
15	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan(***)	25 April s.d 17 Mei 2025

I. **KETENTUAN LAIN**

1. Bagi unit kerja yang pimpinan perangkat daerahnya lowong maka Surat Keterangan ditandatangani oleh Asisten yang membidangi;
2. Seluruh tahapan seleksi Pengadaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende Formasi Tahun Anggaran 2024 **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun atau **GRATIS**;
3. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
4. Pemerintah Kabupaten Ende tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Pengadaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende Formasi Tahun Anggaran 2024;

5. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusan pelamar karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan kelulusannya akan dinyatakan gugur/dibatalkan;
6. Pelamar dapat dibatalkan kelulusannya apabila pelamar:
 - a. Mengundurkan diri;
 - b. Dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;
 - c. Terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri;
 - d. Tidak memenuhi persyaratan seleksi; atau
 - e. Meninggal dunia.
7. Dalam hal pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) jenis pengadaan ASN (PNS atau PPPK) dan/atau 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis Jabatan atau menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda maka yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;
8. Bagi pelamar yang ingin memastikan status tenaga non-ASN yang terdata pada database BKN dapat melakukan pengecekan sendiri di aduan helpdesk SSCASN:
 - https://helpdesk-sscasn.bkn.go.id/cek_pegawai_non_asn
9. Informasi resmi yang terkait dengan Seleksi Pengadaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada Alamat:
 - website <https://sscasn.bkn.go.id>
 - www.endekab.go.id

Ketua Panitia Seleksi Pengadaan PPPK
Kabupaten Ende,



HIPARKUS HEPPL, SE
NIP. 196512091994031008

CONTOH LAMPIRAN FORMAT SURAT LAMARAN (surat diketik)

..... 2024

Yth. Pj. Bupati Ende
c.q. Kepala BKPSDM Kabupaten Ende
di
Ende

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Nomor HP :
Pendidikan/Program Studi :
Jenis Kebutuhan : Prioritas/eks THK-II/ tenaga non-ASN terdaftar dalam
database BKN/ tenaga non-ASN tidak terdaftar dalam
database BKN*)
Jabatan Yang dilamar :
Unit Kerja Penempatan :
Alamat :

dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende formasi Tahun 2024. Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan dokumen kelengkapan yang telah diunggah sebagai berikut:

1. Pasfoto terbaru berukuran 4 x 6 menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah;
2. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli/Surat Keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang masih berlaku;
3. Scan Ijazah/STTB asli;
4. Scan Transkrip Nilai/Daftar Nilai asli;
5. Scan Surat Pernyataan 5 Poin bermeterai;
6. Scan surat keterangan bekerja di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar paling singkat 2 (dua) tahun yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja;
7. Surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitas; **)

Seluruh data dan dokumen yang saya berikan adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia seleksi membatalkan keikutsertaan/kelulusan saya pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Pemerintah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2024.

Demikian Surat Lamaran ini, Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Meterai

tanda tangan
(Nama Lengkap)

*)Pilih salah satu.
**) Berkas nomor 7 hanya berlaku bagi Penyandang Disabilitas.

CONTOH LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN 5 POIN

SURAT PERNYATAAN 5 POIN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

Alamat :

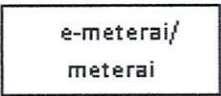
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
3. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil alih oleh instansi Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar.

Ende, 2024

Yang membuat pernyataan,



Tanda tangan

nama lengkap

CONTOH LAMPIRAN FORMAT SURAT KETERANGAN BEKERJA
(untuk Tenaga Non ASN yang Terdata dalam Database BKN)

KOP INSTANSI/LEMBAGA

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA
Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Instansi/Lembaga :

menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Jabatan yang Dilamar :

Telah bekerja pada unit kerja.....*) Pemerintah Kabupaten Ende selama tahun.....bulan dan melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan yang dilamar dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk memenuhi persyaratan pelamaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2024
Nama Jabatan Penandatangan **),
Nama Instansi/Lembaga

(ttd+cap stempel basah)

(Nama Pejabat Penandatangan)

Keterangan:

*) Unit Kerja Perangkat Daerah/RSUD/Puskesmas/Sekolah
**) Pejabat yang menandatangani Suket adalah pimpinan PD/Direktur/Kapus/Kasek/Ketua Yayasan
(Asisten yang membidangi bagi perangkat daerah yang pimpinan unit kerjanya lowong)

CONTOH LAMPIRAN FORMAT SURAT KETERANGAN AKTIF BEKERJA
(untuk Tenaga Non ASN yang Terdata dalam Database BKN)

KOP INSTANSI

SURAT KETERANGAN AKTIF BEKERJA
Nomor:

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja/Instansi :

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :
Tempat & tanggal lahir :
Pendidikan :
Unit Kerja/Instansi :

Adalah tenaga non ASN yang terdata dalam database BKN dan aktif bekerja pada unit kerja di*) Pemerintah Kabupaten Ende.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana perlunya.

....., 2024
Nama Jabatan Penandatanganan **),

(ttd+cap stempel basah)

(Nama Pejabat Penandatanganan)

Keterangan:

- *) Unit Kerja Perangkat Daerah/RSUD/Puskesmas/Sekolah
- **) Pejabat yang menandatangani Suket adalah pimpinan PD/Direktur/Kapus/Kasek/Ketua Yayasan
(Asisten yang membidangi bagi perangkat daerah yang pimpinan unit kerjanya lowong)

CONTOH LAMPIRAN FORMAT SURAT KETERANGAN BEKERJA
(untuk Tenaga Non ASN yang Tidak Terdata dalam Database BKN)

KOP INSTANSI/LEMBAGA

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Instansi/Lembaga :

menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Jabatan yang Dilamar :

Telah bekerja pada unit kerja.....*) Pemerintah Kabupaten Ende selama
..... tahun.....bulan dan melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan yang dilamar
dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-
benarnya untuk memenuhi persyaratan pelamaran Seleksi Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

****, 2024
Nama Jabatan Penandatanganan **),
Nama Instansi/Lembaga

(ttd+cap stempel basah)

(Nama Pejabat Penandatanganan)**

Keterangan:

*) Unit Kerja Perangkat Daerah/RSUD/Puskesmas/Sekolah

**) Pejabat yang menandatangani Suket adalah pimpinan PD/Direktur/Kapus/Kasek/Ketua
Yayasan
(Asisten yang membidangi bagi perangkat daerah yang pimpinan unit kerjanya lowong)

CONTOH LAMPIRAN FORMAT SURAT KETERANGAN AKTIF BEKERJA
(untuk Tenaga Non ASN yang Tidak Terdata dalam Database BKN)

KOP INSTANSI

SURAT KETERANGAN AKTIF BEKERJA
Nomor:

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja/Instansi :

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :
Tempat & tanggal lahir :
Pendidikan :
Unit Kerja/Instansi :

Adalah tenaga non ASN yang aktif bekerja pada unit kerja*) Pemerintah Kabupaten Ende dan telah melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan yang dilamar selama.....tahun.....bulan terhitung mulai tanggal.....sampai dengan dikeluarkannya surat keterangan ini.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana perlunya.

....., 2024
Nama Jabatan Penandatangan **),

(ttd+cap stempel basah)

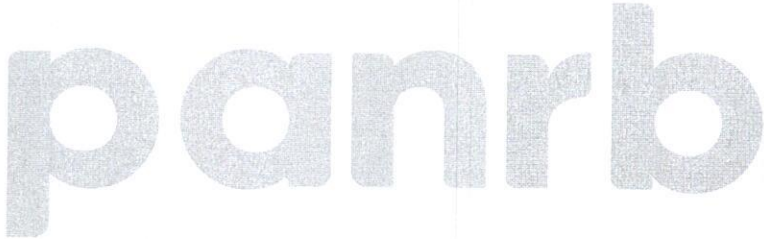
(Nama Pejabat Penandatangan)**

Keterangan:

*) Unit Kerja Perangkat Daerah/RSUD/Puskesmas/Sekolah
**) Pejabat yang menandatangani Suket adalah pimpinan PD/Direktur/Kapus/Kasek/Ketua Yayasan
(Asisten yang membidangi bagi perangkat daerah yang pimpinan unit kerjanya lowong)

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. ENDE
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
A .	GURU	300	
1.	GURU AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	45	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	GURU AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	14	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	GURU AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	5	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.	GURU AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5.	GURU AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
6.	GURU AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	51	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
7.	GURU AHLI PERTAMA - GURU IPA	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
8.	GURU AHLI PERTAMA - GURU KELAS-SD	26	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
9.	GURU AHLI PERTAMA - GURU KELAS-TK	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
10.	GURU AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	72	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
11.	GURU AHLI PERTAMA - GURU PPKN	12	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
12.	GURU AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRUSAHAAN	6	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
13.	GURU AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	51	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
14.	GURU AHLI PERTAMA - GURU TIK	11	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



NO	JABATAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
B .	TENAGA KESEHATAN	300	
1.	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SAGA
2.	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KOTA ENDE
3.	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS RIA RAJA
4.	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WATUNGGERE
5.	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS DETUSOKO
6.	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MAUBASA
7.	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WELAMOSA
8.	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN RS KELAS D PRATAMA TANALI ADMINISTRASI
9.	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WATUNGGERE
10.	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN RS KELAS D PRATAMA TANALI FARMASI
11.	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KOTA ENDE
12.	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WOLO WARU
13.	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WOLOJITA
14.	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WOLO WARU
15.	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WELAMOSA
16.	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MUKUSAKI PUSKESMAS MUKUSASAKI
17.	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KOTA ENDE
18.	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MAUKARO
19.	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS NDETUNDORA
20.	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MAUBASA
21.	BIDAN AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LOBONIKI
22.	BIDAN AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SAGA
23.	BIDAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MONI
24.	BIDAN AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN RS KELAS D PRATAMA TANALI RUANG BERSALIN
25.	BIDAN AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS ONEKORE
26.	BIDAN AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS REWARANGGA
27.	BIDAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN RSUD ENDE RUANG KEBIDANAN DAN KANDUNGAN KLS VIP, I & II
28.	BIDAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KOTA ENDE
29.	BIDAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MUKUSAKI PUSKESMAS MUKUSASAKI
30.	BIDAN AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS NDETUNDORA
31.	BIDAN AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN RS KELAS D PRATAMA TANALI IGD
32.	BIDAN AHLI PERTAMA	3	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MAUKARO
33.	BIDAN AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN RS KELAS D PRATAMA TANALI RUANG NIFAS
34.	BIDAN TERAMPIL	3	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MAUBASA
35.	BIDAN TERAMPIL	3	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WOLO WARU
36.	BIDAN TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN RS KELAS D PRATAMA TANALI IGD
37.	BIDAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS ONEKORE
38.	BIDAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KOTA

NO	JABATAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
			BARU HANGALANDE
39.	BIDAN TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MAUROLE
40.	BIDAN TERAMPIL	5	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MUKUSAKI PUSKESMAS MUKUSASAKI
41.	BIDAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN RS KELAS D PRATAMA TANALI POLI KEBIDANAN
42.	BIDAN TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS NANGA PANDA
43.	BIDAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KOTA BARU TOU
44.	BIDAN TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS REWARANGGA
45.	BIDAN TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS NDETUNDORA
46.	BIDAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KOTA BARU KOTABARU
47.	BIDAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KOTA BARU TOU TIMUR
48.	BIDAN TERAMPIL	4	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS A. YANI
49.	BIDAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KOTA BARU LISELANDE
50.	BIDAN TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WATUNESO
51.	BIDAN TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WATUNGGERE
52.	BIDAN TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WOLOJITA
53.	BIDAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN RS KELAS D PRATAMA TANALI RUANG NIFAS
54.	BIDAN TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN RS KELAS D PRATAMA TANALI RUANG BERSALIN
55.	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
56.	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KOTA BARU
57.	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS RIA RAJA
58.	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS NANGA PANDA
59.	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS REWARANGGA
60.	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS NDETUNDORA
61.	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WELAMOSA
62.	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MONI
63.	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS ONEKORE
64.	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WATUNGGERE
65.	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MAUBASA
66.	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MAUKARO
67.	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS DETUSOKO
68.	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MUKUSAKI PUSKESMAS MUKUSASAKI
69.	FISIOTERAPIS AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN RSUD ENDE POLIKLINIK - POLI FISIOTERAPI
70.	FISIOTERAPIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN RS KELAS D PRATAMA TANALI REHABILITASI MEDIK
71.	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS RIA RAJA
72.	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WELAMOSA
73.	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LOBONIKI
74.	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MUKUSAKI PUSKESMAS MUKUSASAKI
75.	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS ROGA
76.	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS RUKUN

NO	JABATAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
			LIMA
77.	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN RSUD ENDE INSTALASI GIZI
78.	NUTRISIONIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MAUKARO
79.	NUTRISIONIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS REWARANGGA
80.	NUTRISIONIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WOLO WARU
81.	NUTRISIONIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LOBONIKI
82.	NUTRISIONIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SAGA
83.	NUTRISIONIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS ONEKORE
84.	NUTRISIONIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS DETUSOKO
85.	NUTRISIONIS TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN RS KELAS D PRATAMA TANALI GIZI
86.	NUTRISIONIS TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN RSUD ENDE INSTALASI GIZI
87.	OKUPASI TERAPIS TERAMPIL	3	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN RSUD ENDE POLIKLINIK - POLI FISIOTERAPI
88.	PENATA ANESTESI AHLI PERTAMA	3	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN RSUD ENDE INSTALASI BEDAH SENTRAL
89.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WOLOJITA
90.	PERAWAT AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LOBONIKI
91.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS NGALUPOLO
92.	PERAWAT AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MAUROLE
93.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN RSUD ENDE RUANG PAVILIUN
94.	PERAWAT AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN RSUD ENDE RUANG PERAWATAN PENY. DALAM VIP, KLS I & II
95.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WELAMOSA
96.	PERAWAT AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS REWARANGGA
97.	PERAWAT AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS NANGA PANDA
98.	PERAWAT AHLI PERTAMA	3	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MUKUSAKI PUSKESMAS MUKUSAKI
99.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WATUNESO
100.	PERAWAT AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KOTA ENDE
101.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN RSUD ENDE PERINATAL
102.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KOTA BARU TOU TIMUR
103.	PERAWAT AHLI PERTAMA	6	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN RS KELAS D PRATAMA TANALI RUANG RAWAT INAP
104.	PERAWAT AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN RS KELAS D PRATAMA TANALI IGD
105.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS A. YANI
106.	PERAWAT AHLI PERTAMA	3	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WOLO WARU
107.	PERAWAT AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS ROGA
108.	PERAWAT AHLI PERTAMA	3	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN RSUD ENDE INSTALASI GAWAT DARURAT
109.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS ONEKORE
110.	PERAWAT AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MONI
111.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KOTA RATU
112.	PERAWAT AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SAGA
113.	PERAWAT TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WOLOJITA
114.	PERAWAT TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS A. YANI
115.	PERAWAT TERAMPIL	6	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN RS KELAS D PRATAMA TANALI RUANG RAWAT INAP

NO	JABATAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
116.	PERAWAT TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WATUNGGERE
117.	PERAWAT TERAMPIL	3	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN RSUD ENDE INSTALASI GAWAT DARURAT
118.	PERAWAT TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS NDETUNDORA
119.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN RSUD ENDE RUANG PERAWATAN KHUSUS
120.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KOTA BARU TIWUSORA
121.	PERAWAT TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS DETUSOKO
122.	PERAWAT TERAMPIL	3	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS ROGA
123.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN RSUD ENDE PERINATAL
124.	PERAWAT TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN RS KELAS D PRATAMA TANALI IGD
125.	PERAWAT TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MONI
126.	PERAWAT TERAMPIL	4	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WOLO WARU
127.	PERAWAT TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MAUKARO
128.	PERAWAT TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MAUROLE
129.	PERAWAT TERAMPIL	3	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WATUNESO
130.	PERAWAT TERAMPIL	3	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MUKUSAKI PUSKESMAS MUKUSASAKI
131.	PERAWAT TERAMPIL	3	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LOBONIKI
132.	PERAWAT TERAMPIL	4	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MAUBASA
133.	PERAWAT TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KOTA ENDE
134.	PERAWAT TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS NANGA PANDA
135.	PEREKAM MEDIS AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WATUNGGERE
136.	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WELAMOSA
137.	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LOBONIKI
138.	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MUKUSAKI PUSKESMAS MUKUSASAKI
139.	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WOLO WARU
140.	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SAGA
141.	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS DETUSOKO
142.	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WOLOJITA
143.	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	4	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN RSUD ENDE INSTALASI REKAM MEDIS
144.	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN RS KELAS D PRATAMA TANALI REKAM MEDIK
145.	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MONI
146.	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS NANGA PANDA
147.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KOTA RATU
148.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MONI
149.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS DETUSOKO
150.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	4	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN RSUD ENDE INSTALASI LABORATORIUM
151.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WATUNESO
152.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS NANGA PANDA
153.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WOLO WARU
154.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN RS KELAS D

NO	JABATAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
	TERAMPIL		PRATAMA TANALI LABORATORIUM
155.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
156.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MONI
157.	RADIOGRAFER TERAMPIL	3	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN RSUD ENDE INSTALASI RADIOLOGI
158.	TEKNISI ELEKTROMEDIS AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
159.	TEKNISI ELEKTROMEDIS AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WATUNGGERE
160.	TEKNISI ELEKTROMEDIS TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN RSUD ENDE IPSRs
161.	TEKNISI ELEKTROMEDIS TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
162.	TEKNISI ELEKTROMEDIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN RS KELAS D PRATAMA TANALI IPSRS
163.	TEKNISI ELEKTROMEDIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SAGA
164.	TEKNISI TRANSFUSI DARAH TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN RSUD ENDE INSTALASI LABORATORIUM
165.	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LOBONIKI
166.	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WOLO WARU
167.	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MAUBASA
168.	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WOLOJITA
169.	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS NANGA PANDA
170.	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS REWARANGGA
171.	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS NGALUPOLO
172.	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KOTA BARU
173.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KOTA RATU
174.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KOTA ENDE
175.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
176.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WOLO WARU
177.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MUKUSAKI PUSKESMAS MUKUSASAKI
178.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN RSUD ENDE IPSRs
179.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KOTA ENDE
180.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS NDETUNDORA
181.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WATUNESO
182.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS NANGA PANDA
183.	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS DETUSOKO
184.	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LOBONIKI
185.	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MAUKARO
186.	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN RS KELAS D PRATAMA TANALI POLI GIGI
187.	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WELAMOSA
188.	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MUKUSAKI PUSKESMAS MUKUSASAKI

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
C.	TENAGA TEKNIS		600	
1.	ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 AGRIBISNIS ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 EKONOMI PERTANIAN ; S-1 GIZI ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 TEKNOLOGI PANGAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KETAHANAN PANGAN BIDANG KONSUMSI DAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN
2.	ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN TERAMPIL	D-III PERTANIAN ; D-III PETERNAKAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PERTANIAN BIDANG TANAMAN PANGAN
3.	INSTRUKTUR AHLI PERTAMA	S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN ; D-IV SAINS DATA TERAPAN ; S-1 TEKNIK MESIN ; S-1 TEKNIK INDUSTRI	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LATIHAN KERJA
4.	MEDIK VETERINER AHLI PERTAMA	PROFESI DOKTER HEWAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PERTANIAN BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
5.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA IPS ; SLTA IPA ; PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SAGA
6.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	4	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BIDANG PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
7.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA IPA ; SLTA IPS	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN RS KELAS D PRATAMA TANALI
8.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS LINGKUNGAN HIDUP SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
9.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT ; SLTA	5	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PERIKANAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
10.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA KEJURUAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARAGA SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
11.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA ; SLTA KEJURUAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS ONEKORE
12.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	3	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERALATAN
13.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA	10	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ENDE ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BAGIAN UMUM
14.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA/SMA SEDERAJAT	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE INSPEKTORAT DAERAH SEKRETARIAT SUBBAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN
15.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
16.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
17.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
18.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
19.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL SUBBAGIAN TATA USAHA
20.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA	5	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
21.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SMK INFORMATIKA JURUSAN KOMPUTER TEKNIK JARINGAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN
22.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PARIWISATA BIDANG INDUSTRI PARIWISATA
23.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	6	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BIDANG BINA MARGA
24.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN SEKSI PENCEGAHAN KEBAKARAN
25.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA BIDANG KELUARGA BERENCANA
26.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA IPS ; SLTA IPA	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS NGALUPOLO
27.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	20	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN BIDANG PENGELOLAAN SARANA PERDAGANGAN
28.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PERSAMAAN SLTA (PAKET C) ; SLTA KEJURUAN ; SLTA	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PARIWISATA SEKRETARIAT SUB BAGIAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
				UMUM DAN KEPEGAWAIAN
29.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SPP SPMA ; SPP SNAKMA ; SPP PERTANIAN ; SPP PETERNAKAN ; SMEA ; SLTA	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PERTANIAN BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
30.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	3	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BIDANG AIR BERSIH
31.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN SEKRETARIAT SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
32.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	45	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS LINGKUNGAN HIDUP BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERACUN DAN BERBAHAYA
33.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	3	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PERHUBUNGAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
34.	PARAMEDIK VETERINER PEMULA	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BIDANG KESEHATAN HEWAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PERTANIAN BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
35.	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	PERSAMAAN SLTA (PAKET C) ; SLTA/SMA SEDERAJAT ; SMA IPA ; SMA IPS ; SMK ; SMK TEKNIK	30	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN
36.	PEMADAM KEBAKARAN TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG	5	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN
37.	PENATA LAKSANA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN PEMULA	SMK TEKNIK GAMBAR BANGUNAN ; SMK TEKNIK JARINGAN TENAGA LISTRIK	3	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BIDANG PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
38.	PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN PEMULA	SMK DESAIN GAMBAR MESIN ; SLTA/SMA SEDERAJAT ; SMK GEOMATIKA ; SMK TEKNIK GAMBAR BANGUNAN ; SMK TEKNIK MESIN ; SMK TEKNIK OTOMOTIF ; SMK TEKNIK SURVEI DAN PEMETAAN	7	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BIDANG BINA MARGA
39.	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR PEMULA	SLTA/SMA SEDERAJAT ; SMK	5	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BIDANG PENGAIRAN
40.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ILMU PENDIDIKAN ; S-1 KEHUTANAN	3	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
41.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	D-IV/S-1 LINTAS DISIPLIN ILMU	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SEKRETARIAT SUB BAGIAN KEUANGAN
42.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	D-IV/S-1 EKONOMI	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE KECAMATAN ENDE UTARA SEKSI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
43.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	D-IV/S-1 LINTAS DISIPLIN ILMU	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KETAHANAN PANGAN BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN
44.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	D-IV/S-1 LINTAS DISIPLIN ILMU	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE BADAN PENDAPATAN DAERAH BIDANG PENAGIHAN DAN PENYULUHAN SUB BIDANG PENYULUHAN DAN KEBERATAN
45.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 PENDIDIKAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE BADAN PENDAPATAN DAERAH SEKRETARIAT SUB BAG. UMUM & KEPEGAWAIAN
46.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 MANAJEMEN PARIWISATA ; S-1 MANAJEMEN PERHOTELAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PARIWISATA BIDANG INDUSTRI PARIWISATA
47.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	D-IV/S-1 LINTAS DISIPLIN ILMU	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN BIDANG PERTANAHAN
48.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	D-IV/S-1 LINTAS DISIPLIN ILMU	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
49.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ADMINISTRASI PEMASARAN ; S-1 ADMINISTRASI PERKANTORAN ; S-1 EKONOMI AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI DAN PEMBANGUNAN ; S-1 ILMU POLITIK	3	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH BIDANG PERIZINAN DAN KELEMBAGAAN
50.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 BIOLOGI ; S-1/D-IV TEKNIK LINGKUNGAN ; D-IV/S-1 MANAJEMEN ; D-IV/S-1 AKUNTANSI	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH SUBBAGIAN TATA USAHA
51.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	D-IV/S-1 EKONOMI ; S-1 TEKNIK SIPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BIDANG SURVEY, PENGENDALIAN DAN BINA PROGRAM
52.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI ; S-1 SOSIAL	3	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE KECAMATAN ENDE SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
53.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 HUKUM ; S-1 TATA RUANG	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BIDANG PENATAAN RUANG
54.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	D-IV/S-1 AKUNTANSI ; D-IV/S-1 EKONOMI ; D-IV/S-1 LINTAS DISIPLIN ILMU	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PERHUBUNGAN BIDANG PERHUBUNGAN DARAT SEKSI LALU LINTAS, ANGKUTAN JALAN DAN PENYEBERANGAN
55.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ILMU KEPENDIDIKAN KIMIA ; S-1 BAHASA DAN SASTRA ; S-1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA ; S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS DAN SASTRA INGGRIS	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN ENDE BIDANG PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
				PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA
56.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	D-IV/S-1 AKUNTANSI	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SEKRETARIAT SUB BAGIAN KEUANGAN
57.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 TEKNIK AERONAUTIKA ; D-IV PENDIDIKAN KIMIA ; S-1 KEPENDIDIKAN KIMIA ; S-1 BAHASA DAN SASTRA INDONESIA ; S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	3	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN ENDE BIDANG PENGEMBANGAN KOLEKSI, PENGOLAHAN DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN
58.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	D-IV/S-1 LINTAS DISIPLIN ILMU	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH BIDANG AKUNTANSI SUB BID. AKUNTANSI PELAPORAN
59.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	D-IV/S-1 LINTAS DISIPLIN ILMU	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA BIDANG KEPEMUDAAN
60.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ADMINISTRASI ; D-IV/S-1 EKONOMI ; S-1 SOSIAL	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE KECAMATAN ENDE UTARA KELURAHAN ROWORENA SEKSI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
61.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 SOSIAL ; S-1 TEKNIK ARSITEK ; S-1 KOMPUTER ; S-1 TEKNIK SIPIL	4	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BIDANG PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
62.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	D-IV/S-1 LINTAS DISIPLIN ILMU	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH BIDANG AKUNTANSI SUB BID. VERIFIKASI
63.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 GIZI ; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT ; S-1 KESEHATAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS NGALUPOLO
64.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	D-IV/S-1 EKONOMI ; S-1 SOSIAL	3	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ENDE BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN
65.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 TEKNIK SIPIL ; D-IV/S-1 TEKNIK INFORMATIKA	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BIDANG BINA MARGA
66.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	D-IV/S-1 LINTAS DISIPLIN ILMU	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ENDE BAGIAN TATA USAHA KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
67.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 TEKNIK LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK MESIN	3	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BIDANG AIR BERSIH
68.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 KESEHATAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN RS KELAS D PRATAMA TANALI
69.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	D-IV/S-1 LINTAS DISIPLIN ILMU	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE BADAN PENDAPATAN DAERAH BIDANG PENAGIHAN DAN PENYULUHAN SUB BIDANG PENGELOLAAN PIUTANG
70.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 SOSIAL ; S-1 EKONOMI	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE KECAMATAN ENDE UTARA KELURAHAN KOTARATU SEKSI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
71.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	D-IV/S-1 EKONOMI ; S-1 ADMINISTRASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE KECAMATAN ENDE UTARA KELURAHAN ROWORENA SEKSI PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN
72.	PENERA TERAMPIL	D-III INSTRUMENTASI DAN METROLOGI ; D-III METROLOGI DAN INSTRUMENTASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL
73.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA BIDANG PERENCANAAN
74.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE KECAMATAN WOLOJITA SEKSI PELAYANAN UMUM
75.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SEKOLAH MENENGAH ATAS	3	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN SEKRETARIAT
76.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PERIKANAN BIDANG PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP
77.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS LINGKUNGAN HIDUP UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN SUBBAGIAN TATA USAHA
78.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS LINGKUNGAN HIDUP BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERACUN DAN BERBAHAYA
79.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA ADMINISTRASI PERKANTORAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN SEKRETARIAT SUBBAGIAN KEUANGAN
80.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SMK PERKANTORAN ; SLTA ; SMK	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PARIWISATA BIDANG KELEMBAGAAN
81.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN I
82.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PARIWISATA BIDANG PROMOSI DAN PEMASARAN
83.	PENGADMINISTRASI	SLTA ; SLTA KEJURUAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
	PERKANTORAN			KECAMATAN WOLOWARU SEKSI PEMERINTAHAN
84.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE KECAMATAN ENDE TIMUR SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
85.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS SOSIAL BIDANG REHABILITASI SOSIAL
86.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS SOSIAL SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
87.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA ADMINISTRASI PERKANTORAN	4	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE SEKRETARIAT DPRD BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
88.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE KECAMATAN MAUROLE SEKSI PAMONG PRAJA DAN LINMAS
89.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA BIDANG PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PEMUKIMAN TRANSMIGRASI
90.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE KECAMATAN WOLOJITA SEKSI POLISI PAMONG PRAJA DAN LINMAS
91.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	4	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
92.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA ; PERSAMAAN SLTA	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE KECAMATAN NDORI SEKRETARIAT SUB BAGIAN PROGRAM, KEUANGAN DAN PELAPORAN
93.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAHA SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
94.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA KEJURUAN ; SMK MANAJEMEN BISNIS	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
95.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	4	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
96.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA	3	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA BIDANG PEMERINTAHAN DESA
97.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	5	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PERHUBUNGAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
98.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN III
99.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA UMUM	3	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
100.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	10	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PERHUBUNGAN BIDANG PERHUBUNGAN DARAT SEKSI PENGUJIAN KENDARAAN DAN KESELAMATAN
101.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE KECAMATAN ENDE TENGAH KELURAHAN KELIMUTU SEKSI PEMERINTAHAN, KEAMANAN DAN KETERTIBAN
102.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA	3	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
103.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA ADMINISTRASI PERKANTORAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ENDE BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
104.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS LINGKUNGAN HIDUP BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN
105.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE KECAMATAN ENDE TENGAH KELURAHAN POTULANDO SEKRETARIAT KELURAHAN POTULANDO
106.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN KEUANGAN
107.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN II
108.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA ADMINISTRASI PERKANTORAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PARIWISATA BIDANG INDUSTRI PARIWISATA
109.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA KEJURUAN	3	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE KECAMATAN NDONA SEKSI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
110.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA ; PERSAMAAN SLTA	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BIDANG LAYANAN ELECTRONIC-GOVERNMENT
111.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA SEKRETARIAT
112.	PENGADMINISTRASI	SLTA UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS

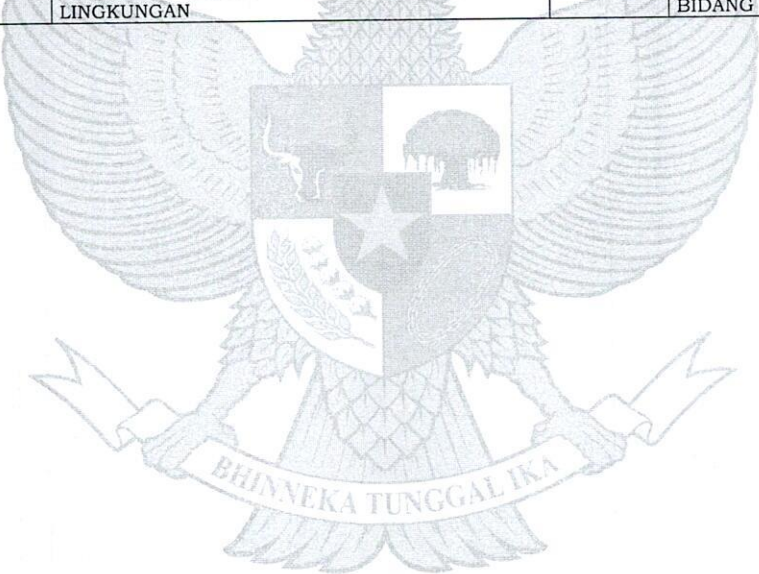
NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
	PERKANTORAN			KETAHANAN PANGAN SEKRETARIAT
113.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE KECAMATAN MAUROLE SEKSI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
114.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PERIKANAN SEKRETARIAT
115.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SMEA ADMINISTRASI PERKANTORAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE KECAMATAN ENDE TIMUR SEKSI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
116.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA KEJURUAN ; SLTA	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE KECAMATAN ENDE UTARA SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
117.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN ENDE BIDANG POLITIK DALAM NEGERI
118.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA	3	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA SEKRETARIAT
119.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE KECAMATAN ENDE TENGAH KELURAHAN PAUPIRE KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN
120.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BIDANG AIR BERSIH
121.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE KECAMATAN NDORI SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
122.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA	3	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN DESA
123.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE KECAMATAN ENDE TIMUR SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
124.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SEKOLAH MENENGAH ATAS	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT
125.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE KECAMATAN ENDE TIMUR SEKSI PEMERINTAHAN
126.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PERIKANAN BIDANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN
127.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PERIKANAN BIDANG PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA
128.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA KEJURUAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MAUKARO
129.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN IV
130.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE KECAMATAN WOLOJITA SEKSI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
131.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LATIHAN KERJA SUBBAGIAN TATA USAHA
132.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA KEJURUAN	3	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE KECAMATAN NDONA SEKSI PELAYANAN UMUM
133.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BIDANG PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
134.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	3	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SEKRETARIAT
135.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE KECAMATAN ENDE TENGAH KELURAHAN PAUPIRE SEKRETARIAT
136.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA ADMINISTRASI PERKANTORAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SEKRETARIAT
137.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA KEJURUAN	3	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE KECAMATAN LEPEMBUSU KELISOKE SEKSI POLISI PAMONG PRAJA DAN LINMAS
138.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	3	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS LINGKUNGAN HIDUP SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
139.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SPP SPMA ; SPP SNAKMA ; SPP PERTANIAN ; SPP PETERNAKAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PERTANIAN BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
140.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSAMAAN SLTA (PAKET C) ; SLTA ; MADRASAH ALIYAH	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN ENDE BIDANG PEMBINAAN KEARSIPAN, LAYANAN, PEMANFAATAN DAN JASA KEARSIPAN
141.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	3	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PERHUBUNGAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN KEUANGAN
142.	PENGADMINISTRASI	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
	PERKANTORAN			PARIWISATA BIDANG DESTINASI
143.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BIDANG PENATAAN RUANG
144.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA	5	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ENDE BAGIAN TATA USAHA KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
145.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA ; SLTA KEJURUAN	3	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE KECAMATAN DETUSOKO SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
146.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA ADMINISTRASI PERKANTORAN ; SLTA KEJURUAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PARIWISATA SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
147.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BIDANG BINA MARGA
148.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA	3	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA SEKRETARIAT SUB BAGIAN KEUANGAN
149.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA ADMINISTRASI PERKANTORAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE SEKRETARIAT DPRD BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN
150.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS SOSIAL BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
151.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA	3	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE KECAMATAN LEPEMBUSU KELISOKE SEKSI PEMERINTAHAN
152.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE BADAN PENDAPATAN DAERAH SEKRETARIAT
153.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA KEJURUAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE KECAMATAN LEPEMBUSU KELISOKE SEKSI PELAYANAN UMUM
154.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN ENDE BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, AGAMA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
155.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA KEJURUAN	3	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE KECAMATAN LEPEMBUSU KELISOKE SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
156.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA KEJURUAN	5	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENGAWASAN TENAGA KERJA
157.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA KEJURUAN	3	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE KECAMATAN NDONA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
158.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE KECAMATAN WOLOJITA SEKSI PEMERINTAHAN
159.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA	3	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA SEKRETARIAT
160.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SMEA ADMINISTRASI PERKANTORAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE KECAMATAN ENDE TIMUR SEKSI POLISI PAMONG PRAJA DAN LINMAS
161.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	3	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERALATAN SUBBAGIAN TATA USAHA
162.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE KECAMATAN ENDE TENGAH KELURAHAN KELIMUTU SEKRETARIAT KELURAHAN KELIMUTU
163.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE KECAMATAN LIO TIMUR SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
164.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN ENDE BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK
165.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS LINGKUNGAN HIDUP SEKRETARIAT
166.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA ; PERSAMAAN SLTA	4	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SEKRETARIAT SUB BAGIAN KEUANGAN
167.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PERHUBUNGAN BIDANG PERHUBUNGAN LAUT SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT
168.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SEKRETARIAT
169.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA ADMINISTRASI PERKANTORAN	4	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
170.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA ; SLTA KEJURUAN	3	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE KECAMATAN NDONA SEKSI PEMERINTAHAN
171.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SMEA AKUNTANSI ; SMEA ADMINISTRASI PERKANTORAN ; SMEA PERKANTORAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE KECAMATAN ENDE TIMUR SEKSI PELAYANAN UMUM

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
172.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS LINGKUNGAN HIDUP SEKRETARIAT SUB BAGIAN KEUANGAN
173.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS SOSIAL BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL
174.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEKRETARIAT SUB BAGIAN KEUANGAN
175.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	6	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN ENDE SEKRETARIAT
176.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE KECAMATAN ENDE TIMUR SEKRETARIAT SUB BAGIAN PROGRAM, KEUANGAN DAN PELAPORAN
177.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SEKOLAH MENENGAH ATAS	3	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN BIDANG PERTANAHAN
178.	PENGAMAT TERA PEMULA	SLTA/SMA SEDERAJAT ; SMK TEKNIK	3	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL
179.	PENGANTAR KERJA AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INDUSTRI ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; D-IV AGRIBISNIS PERIKANAN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 EKONOMI ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 PARIWISATA ; S-1 SOSIOLOGI	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA BIDANG PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
180.	PENGAWAS KOPERASI AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI KOPERASI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 HUKUM	3	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH BIDANG PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
181.	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III PELAYARAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PERHUBUNGAN BIDANG PERHUBUNGAN LAUT SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT
182.	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III TEKNIK ; D-III TEKNIK SIPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BIDANG BINA MARGA
183.	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III TEKNIK SIPIL ; D-III TEKNIK ARSITEKTUR	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BIDANG PENGAIRAN
184.	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III PERHUBUNGAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PERHUBUNGAN BIDANG PENATAAN SISTEM PERHUBUNGAN SEKSI PENELITIAN & PENGEMBANGAN BIDANG PERHUBUNGAN
185.	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III ADMINIS BISNIS/MANAJEMEN PERKANTORAN ; D-III ADMINISTRASI ; D-III ADMINISTRASI BISNIS ; D-III ADMINISTRASI KEARSIPAN ; D-III ADMINISTRASI KEUANGAN ; D-III ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ; D-III ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH BIDANG PERIZINAN DAN KELEMBAGAAN
186.	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III PERTANIAN ; D-III PETERNAKAN ; D-III PERKEBUNAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PERTANIAN BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
187.	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III ADMINISTRASI ; D-III HUMANIORA	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ENDE ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BAGIAN UMUM
188.	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE KECAMATAN ENDE TIMUR SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
189.	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III ADMINISTRASI ; D-III MANAJEMEN ; D-III MANAJEMEN TEKNIK INFORMATIKA ; D-III TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
190.	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III PERHUBUNGAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PERHUBUNGAN BIDANG PERHUBUNGAN UDARA SEKSI ANGKUTAN UDARA
191.	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III BAHASA DAN SASTRA INGGRIS	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK
192.	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III EKONOMI PEMBANGUNAN ; D-III ADMINIS BISNIS/MANAJEMEN PERKANTORAN ; D-III ADMINISTRASI PEMBANGUNAN ; D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI ; D-III EKONOMI	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE KECAMATAN WOLOWARU SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
193.	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN ENDE SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
194.	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	SEKOLAH MENEGAH PERTAMA	5	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PERHUBUNGAN UPT TERMINAL DAN PARKIR
195.	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	SLTP UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
196.	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	SEKOLAH MENEGAH PERTAMA	4	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN BIDANG PENGELOLAAN SARANA PERDAGANGAN
197.	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	3	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PARIWISATA SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
198.	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	SD/SEDERAJAT	23	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS LINGKUNGAN HIDUP BIDANG

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
				PENGLOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERACUN DAN BERBAHAYA
199.	PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN AHLI PERTAMA	S-1 AGROEKOTEKNOLOGI (MINAT PERLINDUNGAN TANAMAN / HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN); S-1 AGRONOMI; S-1 BIOLOGI; S-1 HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN; S-1 PERLINDUNGAN TANAMAN; S-1 PROTEKSI TANAMAN	3	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PERTANIAN BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
200.	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN; S-1 SOSIOLOGI; S-1 ILMU PEMERINTAHAN; S-1 HUKUM; D-IV KIMIA TERAPAN; D-IV SAINS DATA TERAPAN; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK; S-1 TEKNIK SIPIL; D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN; S-1 BIOLOGI TERAPAN; S-1 AGRONOMI; S-1 ARSITEKTUR; S-1 AKUNTANSI; S-1 EKONOMI	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE KECAMATAN DETUKELI SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
201.	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI; S-1 MANAJEMEN; S-1 HUKUM; S-1 SOSIOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE KECAMATAN WEWARIA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
202.	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 SOSIOLOGI; S-1 AKUNTANSI; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK; S-1 KEHUTANAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE KECAMATAN ENDE TENGAH SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
203.	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH; S-1 ARSITEKTUR	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE KECAMATAN KELIMUTU SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
204.	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK; S-1 AKUNTANSI; S-1 SOSIOLOGI; S-1 BAHASA INGGRIS; S-1 EKONOMI; S-1 TEKNIK SIPIL; S-1 ILMU PEMERINTAHAN; S-1 MANAJEMEN	3	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE KECAMATAN LEPOMBUSU KELISOKE SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
205.	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK; S-1 SOSIOLOGI; S-1 SASTRA INGGRIS	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA BIDANG PEMERINTAHAN DESA
206.	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI; S-1 EKONOMI; S-1 HUKUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE KECAMATAN MAUKARO SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
207.	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 SOSIOLOGI; S-1 AKUNTANSI; S-1 MANAJEMEN; S-1 EKONOMI KOPERASI; S-1 PSIKOLOGI	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE KECAMATAN ENDE TIMUR SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
208.	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI; S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT; S-1 SASTRA INGGRIS; S-1 SOSIOLOGI; S-1 EKONOMI; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN; S-1 MANAJEMEN	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE KECAMATAN NDONA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
209.	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN; S-1 AKUNTANSI; S-1 SOSIOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE KECAMATAN WOLOWARU SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
210.	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 TEKNOLOGI INFORMASI; S-1 SASTRA INDONESIA; S-1 AKUNTANSI; S-1 ARSITEKTUR; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN; S-1 ILMU KOMPUTER; S-1 BAHASA DAN KEBUDAYAAN INDONESIA; S-1 BIOLOGI; S-1 MANAJEMEN; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA; S-1 ILMU PEMERINTAHAN; S-1 ILMU POLITIK; S-1 HUKUM; S-1 TEKNIK MESIN	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA BIDANG PERENCANAAN
211.	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK; S-1 EKONOMI; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA BIDANG PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT DESA, SARANA PRASARANA DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
212.	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 PSIKOLOGI; S-1 HUKUM; S-1 SOSIOLOGI; S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE KECAMATAN ENDE SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
213.	PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PEMULA	SMA IPA; SMK TEKNIK	5	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PERHUBUNGAN BIDANG PERHUBUNGAN DARAT
214.	PENGUJI MUTU BARANG PEMULA	SMK TEKNIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
215.	PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA	D-IV AGRO BISNIS HORTIKULTURA; D-IV KESEHATAN HEWAN; D-IV PENYULUH PERTANIAN; D-IV PETERNAKAN; D-IV TEKNOLOGI PERTANIAN; D-IV SOSIAL EKONOMI PERTANIAN; S-1 AGRIBISNIS; S-1 AGRIBISNIS HORTIKULTURA; S-1 AGRIBISNIS PETERNAKAN; S-1 AGROEKOTEKNOLOGI; S-1 BUDIDAYA PERTANIAN; S-1 NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN TERNAK; S-1 PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN; S-1 PENYULUHAN PERTANIAN LAHAN KERING; S-1 TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN HORTIKULTURA	5	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PERTANIAN BIDANG PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
216.	PENYULUH PERTANIAN TERAMPIL	D-III PENYULUHAN PERTANIAN; D-III PERKEBUNAN; D-III HAMA PENYAKIT TUMBUHAN	15	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PERTANIAN BIDANG PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
217.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN ENDE SEKRETARIAT
218.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN ENDE SEKRETARIAT
219.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 ILMU INFORMATIKA; S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 TEKNIK ELEKTRO; S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PERIKHATAN SEKRETARIAT
220.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAHA SEKRETARIAT

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
221.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
222.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SEKRETARIAT
223.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA SEKRETARIAT
224.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTASI ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 ILMU KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KETAHANAN PANGAN SEKRETARIAT
225.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 ILMU KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS LINGKUNGAN HIDUP SEKRETARIAT
226.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK ELEKTRO	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE BADAN PENDAPATAN DAERAH SEKRETARIAT
227.	PRANATA TRANTIBUM	PERSAMAAN SLTA (PAKET C) ; SLTA KEJURUAN ; SMA IPA ; SLTA/SMA SEDERAJAT ; SMK TEKNIK	11	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT SEKSI OPERASI
228.	PRANATA TRANTIBUM	PERSAMAAN SLTA (PAKET C) ; SLTA KEJURUAN ; SLTA/SMA SEDERAJAT ; SMA IPA ; SMA IPS ; SMK ; SMK TEKNIK	5	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT SEKSI PENCEGAHAN, MITIGASI DAN PENGERAHAN SUMBER DAYA MANUSIA
229.	SURVEYOR PEMETAAN AHLI PERTAMA	D-IV PERTANAHAN ; D-IV TEKNOLOGI SURVEI PEMETAAN DASAR ; S-1 TEKNIK GEODESI ; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK SIPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BIDANG PENGAIRAN
230.	SURVEYOR PEMETAAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA ; D-IV TEKNOLOGI SURVEI PEMETAAN DASAR	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BIDANG AIR BERSIH
231.	SURVEYOR PEMETAAN AHLI PERTAMA	D-IV PERTANAHAN ; S-1 KEHUTANAN ; S-1 ILMU TANAH ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BIDANG BINA MARGA



panrb